



AKSI Mendukung Piagam Jakarta

DIMAS ARDIAN

Perlawanan Islam Liberal

Menguatnya Islam militan di Indonesia mendorong konsolidasi Islam liberal. Memperjuangkan Islam penopang demokrasi.

ADI Wijaya belakangan ini kerap absen dari aksi demo Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jawa Timur. Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya, itu mulai gerah dengan paradigma KAMMI yang ia rasakan kaku dan militan. Meski bukan anggota tetap, Adi sebelumnya sering ikut kegiatan KAMMI.

Sikap Adi memang bergeser. "Islam tidak perlu dipahami secara kaku," kata pria 22 tahun ini. Gerakan Islam, menurut dia, lebih relevan memperjuangkan nilai-nilai, bukan lembaga seperti membentuk negara Islam atau menerapkan syariat via negara. Ia tak sepakat dengan pola gerakan Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam. "Justru menyulitkan kelompok Islam sendiri," katanya.

Diam-diam, sepanjang tiga bulan terakhir, mahasiswa angkatan 1999 itu rajin membaca rubrik "Kajian Utan Kayu" di halaman 4 harian *Jawa Pos* yang terbit tiap

Minggu. Malah, pada Ramadhan ini, terbit tiap hari dengan tajuk "Telaah Ramadhan". Rubrik itu merupakan hasil kerja sama Kajian Islam Utan Kayu, Jakarta, dengan *Jawa Pos* dalam rangka kampanye Islam liberal.

Di Indonesia, dalam setahun terakhir, publikasi mazhab pemikiran yang disebut "Islam liberal" itu memang tampak digarap sistematis. Pengelolaannya menamakan diri "Jaringan Islam Liberal" (JIL). Sebelum lahir JIL, wacana Islam liberal beredar di meja-meja diskusi dan sederet kampus, akibat terbitnya buku *Islamic Liberalism* (Chicago, 1988) karya Leonard Binder, dan *Liberal Islam* (Oxford, 1998) hasil editan Charles Kurzman.

Istilah Islam liberal pertama dipopulerkan Asaf Ali Asghar Fyzee, intelektual muslim India, pada 1950-an. Kurzman sendiri mengaku meminjam istilah itu dari Fyzee. Popularitasnya di Indonesia makin lengkap ketika Yayasan Paramadina, Jakarta, menerbitkan edisi terjemahan buku Kurzman, Juli lalu. Menjamurlah perbin-

cangan seputar label baru ini.

Geloranya banyak diprakarsai anak-anak muda usia, 20-35 tahun. Untuk kasus Jakarta, mereka umumnya para mahasiswa, peneliti, atau jurnalis yang berkorporasi di beberapa lembaga, semisal Paramadina, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU), IAIN Syarif Hidayatullah, atau Institut Studi Arus Informasi.

Komunitas itu makin mengkristal, sehingga pada Maret lalu mereka mengorganisasikan diri dalam JIL. Kegiatan awal dilakukan dengan menggelar kelompok diskusi maya (milis). Sejak 25 Juni 2001, JIL mengisi satu halaman *Jawa Pos* Minggu, berikut 51 koran jaringannya, dengan artikel dan wawancara seputar perspektif Islam liberal.

Tiap Kamis sore, JIL menyiarkan wawancara langsung dan diskusi interaktif dengan para kontributor Islam liberal, lewat kantor berita radio 68H dan 10 radio jaringannya. Situs islamlib.com diluncurkan, dua pekan kemudian. Beberapa nama pemikir muda, seperti Luthfi Assyaukanie (Universitas Paramadina Mulya), Ulil Abshar-Abdalla (Lakpesdam NU), dan Ahmad Sahal (jurnal *Kalam*), terlibat dalam pengelolaan JIL.

Luthfi Assyaukanie, editor situs islamlib.com, menyatakan bahwa lahirnya JIL sebagai respons atas bangkitnya "ekstremisme" dan "fundamentalisme" agama di Indonesia. Itu ditandai oleh munculnya kelompok militan Islam, perusakan gereja,



WWW.ISLAMLIB.COM

yang sudah menjadi stereotipe dalam studi mengenai Islam dan demokrasi. "Islam selama ini dianggap halangan bagi demokrasi," kata lulusan Universitas Ohio, Amerika Serikat, itu. Tak ada contoh berdirinya negara demokrasi yang terkonsolidasi di negara mayoritas muslim. "Namun, komunitas Islam liberal dapat menjadi embrio yang menyimpang dari apa yang sudah menjadi stereotipe itu," katanya.

Penilaian pesimistis dilontarkan Sekretaris Jenderal Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam, Adian Husaini. "Islam liberal tidak menjadi solusi, tetapi malah menjadi problem," katanya. Adian mencurigai Islam liberal sebagai proyek imperialis. Jargon-jargon yang diusung Islam liberal, seperti "menolak politisasi agama", menurut dia, adalah kelanjutan jargon Snouck Hurgronje.

"Jargon itulah yang dikembangkan Benny Moerdani masa Orde Baru," kata Adian, sinis. Penggunaan kata "Islam ekstrem" untuk menunjuk "lawan" Islam liberal, menurut Adian, juga khas Orde Baru. Demokratisasi yang diperjuangkan Islam liberal dinilainya sebagai demokrasi versi Barat. "Islam liberal hanya bertujuan menjinakkan gerakan Islam sehingga tunduk pada Barat," katanya.

Namun, juru bicara Darul Islam, Al Chaidar, tidak melihat Islam liberal sebagai ancaman bagi garis perjuangannya. "Itu tidak melanggar prinsip Darul Islam," kata Chaidar, yang mengaku mengikuti perkembangan Islam liberal. Saat didesak, bagaimana tidak bertentangan sementara Darul Islam memperjuangkan negara Islam, Chaidar menjawab, "Negara Islam Darul Islam sama dengan konsep Cak Nur." Oh, ya?

Kritik mendasar Islam liberal justru berasal dari "mitranya" sesama "lawan" Islam militan, yaitu komunitas yang menamakan diri "Post Tradisionalisme Islam" —biasa disingkat Postra. Kalangan ini umumnya berlatar belakang kultur Nahdlatul Ulama. Markasnya di Lakpesdam Jakarta dan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), Yogyakarta. Label mereka merujuk pada judul terjemahan buku Muhammad Abed Al-Jabiri, pemikir Maroko, yang diterbitkan LKIS.

Rumadi, seorang pejuang Postra, menilai, ada dua kelemahan paradigma Islam liberal. Pertama, kurang empati pada tradisi lokal. Kedua, mengabaikan dinamika spiritualitas. "Saya yakin, paham keagamaan yang membebaskan manusia dari belenggu, sekaligus menghargai aspek lokal, akan lebih dekat dengan perasaan kemanusiaan," kata calon doktor IAIN Jakarta itu. **■**

ASRORI S. KARNI, DAN MUJIB RAHMAN (SURABAYA)

lahirnya sejumlah media penyuar aspirasi "Islam militan", serta penggunaan istilah "jihad" sebagai dalil serangan.

"Kelompok militan itu sebenarnya tidak banyak," kata Luthfi. "Tapi, mereka lebih pintar menggunakan alat komunikasi modern untuk mempengaruhi pendapat umum." Gerakan mereka lebih agresif dan bahasanya sederhana, sehingga mudah dicerna awam. Jika pandangan mereka dominan, kata Luthfi, bisa menghambat demokratisasi Indonesia dan mempersulit tatanan ko-eksistensi damai antarkelompok beragama.

Demokrasi, menurut Luthfi, membutuhkan pandangan keagamaan yang terbuka, plural, dan humanis. Sayangnya, suara kelompok ini makin lirih, karena hanya menjadi konsumsi elite. Bahasanya sulit dicerna awam. Gerakannya kurang gereset. Untuk mencegah dominasi kaum militan, Luthfi mengatakan, harus ada kampanye militan tentang gagasan keagamaan pluralis-humanis.

"Islam liberal datang sebagai protes dan perlawanan terhadap dominasi Islam ortodoks itu," kata alumni Universitas Jordan itu. Luthfi memaknai istilah Islam liberal sebagai identitas untuk merujuk kecenderungan pemikiran Islam modern yang kritis, progresif, dan dinamis. "Dalam pengertian ini, Islam liberal bukanlah sesuatu yang baru," katanya. Fondasinya telah ada sejak awal abad ke-19.

JIL mendaftarkan 28 orang kontributor domestik dan luar negeri sebagai "juru kampanye" Islam liberal. Di antara mereka adalah Nurcholish Madjid, Djohan Ef-

fendi, Jalaluddin Rakhmat, Said Agiel Siradj, Azyumardi Azra, Goenawan Mohamad, Komaruddin Hidayat, dan Rizal Mallarangeng. Beberapa kontributor mancanegara, misalnya, Edward Said (Palestina), Asghar Ali Engineer (Pakistan), Abdullahi Ahmed an-Na'im (Sudan), Mohammed Arkoun (Prancis), dan Charles Kurzman (Amerika).

JIL menyediakan pentas —berupa koran, radio, *booklet* dan *website*— bagi para kontributor itu untuk mengungkapkan pandangannya pada publik. Tema kajiannya berupa soal-soal yang berada dalam lingkup agama dan demokrasi. Misalnya jihad, penerapan syariat Islam, tafsir kritis, keadilan gender, jilbab, atau negara sekuler. Perspektif yang disampaikan berujung pada tesis bahwa Islam selaras dengan demokrasi. Itu yang tergambar dalam wawancara, kolom, dan diskusi JIL.

Pengamat politik Denny J.A. menaruh harapan khusus pada Islam liberal. Ia amat tertarik pada konsep keislaman JIL. "Dari kepentingan politik demokrasi, komunitas Islam liberal ini memberi harapan baru," katanya. Komunitas ini, menurut Direktur Eksekutif Yayasan Universitas Jayabaya itu, menjadi sintesis antara prinsip demokrasi dan agama Islam. "Mereka menginterpretasikan sejarah dan doktrin Islam, sehingga dapat paralel dengan prinsip demokrasi dan pluralisme kebudayaan modern," ujar Denny.

Jika komunitas Islam liberal terus berkembang berikut platformnya, kata Denny, niscaya mereka dapat mengubah apa